

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 70 UNDANG-UNDANG N0 10 TAHUN 2016  
MENGENAI CUTI KAMPANYE PILKADA  
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**USPAN HADIANSYAH  
NPM:1621020321**

**Jurusan: HukumTata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan ideologi Pancasila. Indonesia menganut azas demokrasi yaitu di jalankan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat di mana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara. Adapun pengertian dari demokrasi secara umum adalah sebuah format pemerintahan di mana tiap-tiap warga Negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga Negara. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai cuti kampanye pilkada dan ditinjau dalam *fiqh siyasah*.

Pemasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai cuti kampanye pilkada, Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengenai cuti kampanye pilkada pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 70 undang-undang nomor 10 tahun 2018 mengenai cuti kampanye pilkada. Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field rearch*) yaitu penelitian yang secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan, jenis data terdiri dari data primer dan skunder. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif teknik yang digunakan adalah teknik, wawancara/interview dan dokumentasi lokasi penelitian adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan cuti kampanye pilkada pada pemilihan Gubernur tahu 2018 di Provinsi Lampung, telah berjalan sesuai prosedur pemerintah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 Mengenai cuti Kampanye Pilkada bagi pejabat, hal ini di dukung dengan adanya surat izin cuti kampanye yang di miliki oleh petahana sekaligus tidak ada hal-hal yang melanggar ketentuan dan Analisis *fiqh siyasah* terhadap cuti kampanye pilkada bagi pejabat sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Hal ini di tunjukan dengan kesesuaian hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum islam termasuk implementasinya yang sesuai dengan prosedur, tanpa ada satupun yang bertentangan dengan hukum Islam





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratimin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Nama :** Usman Hadriansyah  
**NPM :** 1621020321  
**Jurusan/Prodi :** Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
**Fakultas :** Syariah  
**Judul Skripsi :** Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi  
Pasal 70 Undang Undang NO 10 Tahun 2016  
mengenai Cuti Kampanye Pilkada. (Studi  
Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

**NIP.195812071987031003**

**NIP.195703051978031001**

**Ketua Jurusan**

**Erenki, M. Si**

**NIP.198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasan Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Cuti Kampanye Pilkada.”** disusun oleh **Uspan Hadiansyah NPM 1621020321** Program Studi **Siyasah Syar'iyah**.  
Telah diujikan dalam sidang **Munhaqasyah** di **Fakultas Syari'ah** Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Sekertaris : Hervin Yoki Pradika, M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Dr. Liky Fiazal, S.Sos., M.H.** (.....)

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A** (.....)

**Penguji III: Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**H. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dengan selesainya skripsiku semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku selawat berserta salam saya sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang motivator pengerak revolusioner dalam berhukum bersistem dan bernegara dalam bingkai akhlakul kharima. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini dan mempersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih bapak Darmawan ibu Yusmadewi kupersembahkan sebua karya kecil untuk kalian berdua yang tidak pernah hentinya memberikan semangat dan doa dan kasih sayang yang tak pernah tergantikan yang selalu memberikan semangat sehingga aku bisa menyelesaikan setiap rintangan yang kuhadapi.
2. Kepada saudaraku kakak dan abangku Linda suryani, Junaidi Hasyim, Ita Handayani, Lia Andriani yang selalu memberi semangat doa dan motivasi dalam setiap langkah perkuliahan ku.
3. Kepada keluarga besarku kakak ipar ku Suwondo, Anwar Wijaya, Tarmizi, Inngit Noviana Riski
4. Buat para keponakan ku yang ada di Rebang Tinggi Solihin, Doni, Dino, Alvin, Intan Dinda Fillio Hani Dan Verrel
5. Buat wanita spesialku Desi Puspica Sari, S.Pd. Yang selalu menemaniku memberikan semangat dan doa
6. Buat kawan-kawanku Hukum Tata Negara Kelas E 2016

7. Almamaterku tercinta jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah UIN

Raden Intan Lampung



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Ber :

Nama : Uspan Hadiansyah

Tempat tanggal lahir : Rebang Tinggi 30 Maret 1995

Agama : Islam

Merupakan anak kelima dari lima bersaudara Putra Pasangan Bapak Darmawan dan Ibu Yusmadiwi

Penulis Menyelesaikan pendidikan di:

1. Sd Negeri 01 Rebang Tinggi di selesaikan Tahun 2008.
3. Mts Guppi Banjit diselesaikan Tahun 2011.
4. SMK Negeri 01 Banjit jurusan akutansi lulus Pada Tahun 2014.
5. Tahun 2016, Penulis diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Falkutas Syari'Ah pada Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah (Siyasah syar'iyah)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang N0 10 Tahun 2016 Tentang Cuti Kampanye Pilkada” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H.A. Kumedi Ja’far, S.Ag.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
4. Drs. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
5. Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

6. Drs. Henry Iwansyah, M.A. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini
7. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Siyasah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
10. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti dihaturkan disetiap sujudmu,
12. Keluarga besarku, saudara-saudara, om, dan tante yang mendukungku.
14. Wanita yang selalu memberikan semangat dan tentunya special Desi Puspica Sari, S.P.d.
15. Teman-teman Siyasah angkatan 16 Isa Royis Wisnu Sarah Dimas Dewi Nabila sofwan efri dan teman-teman siyasah E yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
16. Teman-teman yang selalu memberikan keceriaan Team Galer (Ade Trisna, Wisnu anggara, Fina Anggraini, Helda Amelia Anisa Riska)
17. Teman-teman MAGANG 2018 di KPU Kota Bandar Lampung Isa Abdillah, Yusa Haribrata, Ayu, Liana, Seftian, Rdho Terimakasih kalian telah menjadi saudara-saudaraku.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Penulis

Uspan Hadiansyah



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	5
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Signifikasi Penelitian .....	6
H. Metode Penelitian .....	6
 BAB II KAJIAN TEORI .....	 14
A. Kajian Teori .....	14
1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah .....	13
2. Prinsip siyasah Tentang Kepemimpinan .....	14
3. Hak dan kewajiban pemimpin dalam Islam .....	36
B. Tata Cara Cuti Kampanye Bagi Pejabat Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai cuti kampanye Pilkada Bagi Pejabat .....	42
1. Pengertian Pilkada .....	42
2. Pengertian kampanye .....	43
3. Dasar hukum kampanye .....	45
4. Syarat dan prosedur cuti kampanye .....	46
5. Masa cuti kampanye bagi pejabat yang mecalonkan diri menjadi kepala daerah .....	47
6. Hak dan kewajiban pejabat selama cuti kampanye .....	49
7. Larangan dan Sanksi Cuti Kampanye .....	51
C. Tinjauan Pustaka .....	55
 BAB III Deskripsi Objek Penelitian .....	 59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
B. Ketentuan Syarat Untuk Cuti Kampanye .....	69
C. Prosedur .....	70
D. Hak dan kewajiban .....	70
 BAB IV Analisis Penelitian .....	 71
A. Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	



Mengenai Pelaksanaan Cuti Kampanye Pilkada Bagi Pejabat .....	71
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Cuti Kampanye Pilkada Bagi Pejabat...	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN.....	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Blangko Konsultasi Pembimbing
2. Lampiran 2 Pedoman Wawancara
3. Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
4. Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Provinsi
5. Lampiran 6 Surat Izin Cuti Herman HN
6. Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara
7. Lampiran 8 Dokumentasi penelitian





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam interpretasi dikalangan pembaca terhadap judul skripsi ini maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut. **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Cuti Kampanye Pilkada**

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa yang berupa suatu (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya (sebab, musabab, peristiwa dan perkaranya).<sup>1</sup>
2. Fiqh Siyasah adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk mengali hukum-hukum syara' sehingga dapat di amalkan oleh umat Islam. Sedangkan siyasah adalah mengatur dan mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijakan.<sup>2</sup>
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah di susun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>
4. Pasal 70 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 adalah suatu aturan yang mengatur cuti dalam pelaksanaan kampanye pilkada.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Poewadariminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia PN* (Jakarta: balai pustaka,1997), h.39

<sup>2</sup>Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group,2014),h. 3.

<sup>3</sup>Tim Prima Pena "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gita Media Press), h. 342

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang

5. Cuti adalah dalam (bahasa hndi *chutti*) atau perlop ketidak hadiran sementara, misalnya dari tugas angkatan bersenjata, dalam kasus itu cuti adalah liburan. Di beberapa Negara persemakmuran seperi (Australia dan Selandia Baru). Cuti adalah kepentingan karyawan yang di kenal cuti dinas panjang.<sup>5</sup>
6. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye *elektoral* Pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda di putuskan. Kampanye politis tindakan upaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.<sup>6</sup>
7. Pemilu atau pemilihan umum proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa.<sup>7</sup>

---

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>5</sup>Pengertian Cuti “ (On-Line), tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/cuti> (28 september 2019)

<sup>6</sup> Penegertian Kampanye” (On-Line), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kampanye> (29 September 2019)

<sup>7</sup> Pengertian Pemilu (On-Line), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum> (28 september 2019).

8. Pejabat adalah seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan yang memegang jabatan penting.<sup>8</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi di atas adalah suatu telaah Hukum Islam tentang cuti Kampanye Pilkada bagi Pejabat sebagaimana di atur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Cuti Kampanye Pilkada.

Batasan judul pada permasalahan ini di batasi pada izin cuti kampanye Herman HN pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018.

### **B. Alasan Memilih judul**

Ada beberapa alasan yang menarik sehingga penulis tertarik, untuk membahas masalah ini untuk dijadikan karya ilmiah antara lain:

#### **1. Alasan Memilih judul secara obyektif**

Untuk mengetahui pelaksanaan cuti kampanye bagi pejabat yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah apakah sudah sesuai harapan dan sesuai Undang-undang yang berlaku.

#### **2. Alasan memilih judul secara subyektif**

Pembahasan ini di angkat karena belum ada mahasiswa yang membahas pembahasan ini dalam Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan ideologi Pancasila. Indonesia menganut azas demokrasi yaitu di jalankan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat di mana rakyat ikut

---

<sup>8</sup>Pengertian Pejabat (On-Line),tersedia di: <https://kbbi.web.id/jabat.html> ( 28 september 2019)



serta dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara. Adapun pengertian dari demokrasi secara umum adalah sebuah format pemerintahan di mana tiap-tiap warga Negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga Negara. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Adapun Pasal yang mengatur tentang cuti kampanye diatur dalam Pasal 70 undang-undang Nomor 10 tahun 2016.<sup>9</sup>

Di dalam Hukum Islam persoalan politik dikenal dengan *fiqh siyasah* memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin sedangkan dalam hal ini kampanye ini dalam tindakan yang bersifat persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk meyakinkannya. Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam *fiqh siyasah* memang belum familiar dan di

---

<sup>9</sup> Undang –undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati walikota dan Wakil walikota

kenal secara luas istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini di mana telah terbentuk Negara-bangsa yang bercorak demokrasi bagi Negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam *fiqh siyasah* istilah pemilihan umum dikenal dengan *intikhabah al-'ammah*. Intikhabah merupakan *jama' muannassalim* yang berasal dari kata *intikhabah – yantakhibu* yang artinya memilih oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.<sup>10</sup>

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini terfokus pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dimulai dari persyaratan prosedur dan penetapan waktu cuti dan pelaksanaan cuti kampanye di analisis dalam pandangan *fiqh siyasah*.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup>Ashubli Muhammad, “,Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik,”. *Jurnal Hukum Juris*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2002), h 14

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Cuti Kampanye Pilkada. Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siaysah terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Cuti Kampanye Pilkada. Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Cuti Kampanye Pilkada. Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siaysah terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Cuti Kampanye Pilkada. Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018

#### **G. Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan penulis tentang bagaimana pelaksanaan izin cuti kampanye bagi pejabat.
2. Manfaat Praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya dan memperluas keilmuan dalam bidang hukum. Dan syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana suatu penelitian itu di laksanakan, metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimna cara melaksanakan penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu penelitian.<sup>11</sup> Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden yaitu pada pegawai atau pejabat di KPU Provinsi Lampung.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengangkat data dan pemasalahan yang ada secara langsung tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan di bahas secara rasional, sistematis, dan teoritis. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada pegawai yang bekerja di KPU Provinsi Lampung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan secara objektif dari objek penelitian.<sup>13</sup>

Penelitian ini dimakasud kan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objektif pelaksanaan Pasal 70 undang-undang No.10 tahun 2016 atau KPU provinsi Lampung dalam melaksanakan Undang-Undang N0. 10 Tahun 2016 tentang Cuti Kampanye Pilkada.

3. Sumber data

---

<sup>11</sup>Susiadi,*Metode penelitian*, (Bandari Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung), h.26.

<sup>12</sup>*Ibid* h.12

<sup>13</sup>*Ibid* hlm 196



Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang di kaji sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian digunakan sebagai pokok yang di peroleh melalui interview dan observasi.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pejabat KPU Provinsi Lampung. Data primer dalam studi lapangan pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara (*interview*) berupa pertanyaan yang di ajukan penulis pada responden serta penyelidikan terhadap permasalahan penelitian, dan partisipasi artinya peneliti ikut serta dalam kegiatan masyarakat tersebut supaya lebih mendapatkan data penelitian yang lebih akurat. Data primer berupa hasil hasil wawancara dan juga dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan KPU Provinsi Lampung.

b. Data sekunder

data sekunder menurut Abdurahmat Fhatony adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data geografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial konsep-konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015 ), h .250.

<sup>15</sup>Syarifudin Hidayat, *Metodologi Ppenelitian*, (Bandung: Mandari Maju, 2002), h .21.

Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang di peroleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pokok dan fungsi KPU Provinsi, tentang Pasal 70 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Cuti Kampanye Pilkada. Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018

#### 4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh adalah pegawai dan staff KPU provinsi Lampung sebanyak 15 populasi.<sup>16</sup>

#### 5. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat mewakili populasi.<sup>17</sup> Tujuan peneliti mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. *Purposive sampling* Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.117.

<sup>17</sup> *Ibid.* h.125.

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah di ketahui sebelumnya. Dari data populasi yang ada di KPU Provinsi Lampung kemudian diambil menjadi 5 sampel adapun yang menjadi sampel adalah:

- a. Komisioner KPU sebanyak 2 orang
  - b. Kasubbag teknis 1 orang
  - c. Pegawai/staf KPU 2 orang
6. Teknik pengumpulan data.

- a. Interview/wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden di catat dan di rekam.<sup>18</sup>

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang tidak langsung di tunjukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen dokumen yang di gunakan dapat berupa buku harian surat pribadi laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>19</sup> Studi dokumentasi sangat besar manfaatnya karena dapat menggambarkan latar belakang masalah penelitian juga dapat dijadikan bahan pengecekan terhadap kesesuaian data dan teknik ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis.

Dokumen yang dimaksud yaitu tugas pokok dan fungsi KPU

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h.158

<sup>19</sup>*Ibid*,h170

provinsi dalam Pasal 70 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang cuti kampanye pilkada.

#### 7. Metode pengolahan data

Setelah penelitian memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah karena kemungkinan data yang masuk (*Raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *Edeting* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.sehingga kekurangannya dapat di perbaiki dan di lengkapi.
- b. *Koding* adalah mengklarifikasi jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode/tanda berbentuk angka pada masaing-masing jawaban.<sup>20</sup>
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berutan dan logis,sehingga mudah di pahami dan di interpretasikan.
- d. Penyusunan atau Sistematis data (*contructing dan sistemizing*) yaitu pengelompokan secara sistematis data yang suda di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan dan urutan masalah.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h.182



## 8. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang. Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis metode ini melalui tahapan wawancara, atau penelaahan dokumen.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah *dusturiyah* adalah bagaian dari fiqh siyasah yang membahas masalah-masalah perundang-undangan.<sup>21</sup> *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup
- b. Persoalan imamah hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
- d. Persoalan *baiat*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *alhlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *Fiqh siyasah dusturiyah* umum nya tidak dapat dilepaskan dari dua hal yang *pertama*: dalil-dalil *kully* baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat tidak akan

---

<sup>21</sup> Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 177

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. *Kedua* : aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>22</sup> Apabila dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin di dalam suatu Negara, seperti undang-undang dasar undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasahtanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadla iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>23</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang di letakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Asshiddiqie Jimly, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia," (Jakarta: Sinar Grafika cet II, th. 2011), h. 48

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h 177

## 2. Prinsip-prinsip Siyasah Tentang kepemimpinan

*Siyasah* adalah yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

<sup>25</sup> Sedangkan *siyasah syari'iyah* di artikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dalam term politik Islam, politik itu identik dengan *siyasah* yang secara kebahasaan artinya mengatur kata ini diambil dari akar kata "*sasa-yasusu*" yang artinya mengemudikan mengendalikan mengatur dan sebagainya. Al Qardhawiy dalam bukunya *Al siyasah al syar'iyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasah* menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum *siyasah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.<sup>26</sup> Sementara Ahmad Fathi Bahasi mendefinisikan *siyasah syar'iyah* dengan pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.<sup>27</sup>

Berikut adalah beberapa definisi *siyasah syar'iyah* menurut berbagai parah ahli:

---

<sup>25</sup> Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.3

<sup>26</sup> Ibid h.5

<sup>27</sup> Bahansi fathi Ahmad, *Al siyasah al jinayyah al Islamiyah*, (dar al Arubah), h.61



1. Menurut Ibnu Nujaim, *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan penguasa demi kemashlahatan yang dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci mengaturnya.
2. Menurut Ibnu Aqil al hanbali, *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat Islam lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengatur dan wahyu yang turun terkait hal itu.
3. Menurut Abdul wahab Khallaf, *siyasah syar'iyah* adalah suatu Ilmu yang membahas tentang urusan kenegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan, peradilan dan semua kekuasaan eksekutif, adminstratif serta hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.
4. Menurut Yusuf Al Qaradhawy *siyasah syar'iyah* adalah politok yang bersendikan kaedah-kaedah, aturan bimbingan syara'.
5. Menurut Abdul Al-Atwah, *siyasah syar'iyah* adalah kumpulan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syariat, menjalankan berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.

6. Menurut Sa'ad bin Mathar al-Utaibi, *siyasah syar'iyah* adalah setiap kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh parah pemimpin (*ulil amri*), berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara' yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Definisi ini dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh alqur'an maupun al-sunnah.

Bahansi merumuskan bahwa *siyasah sar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Dapat dirumuskan bahwa hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:<sup>28</sup>

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul -al amr*).

---

<sup>28</sup> Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h 5

- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemuadariatan (*Jalb-almashalih wa daf al-mafasid*)
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Alquran dan al-sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur kehidupan yang bernegara. Dari segi prosedur pembuatan Peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah sebagaimana di perintahkan Allah dalam surat Ali Imran,3:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ  
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai

*orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran[3]:159).*<sup>29</sup>

Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan perintah (*al-musawarah*)
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mushalih wa daff al-mafsid*).

penjelasan di atas bahwa suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah Negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Endang Saifuddin Anshari mengatakan Negara adalah organisasi (orga, badan, alat) bangsa untuk mencapai tujuannya.

---

<sup>29</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *Ali imran* 159 (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h.71



Prinsip-prinsip Negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas. Selain itu, prinsip-prinsip dasar yang tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk dalam fiqh. Para pakar fiqh siyasah berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar politik hukum Islam, Abdul Qadir audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam waaudha'Una al Qonuniah* menistematikan prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut: 1.<sup>30</sup> Persamaan yang komplit 2. Keadilan yang merata 3. Kemerdekaan dalam arti yang sangat luas 4. Persaudaraan 5. Persatuan 6. Gotong royong (saling membantu) 7. Membasmi pelanggaran hukum 8. Menyebarkan sifat-syifat yang utama 9. Menerima dan mempergunakan hak pilihnya yang dianugerahkan tuhan 10. Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya. 11. Berbuat kebajikan saling menyantuni 12. Memegang teguh prinsip musyawarah.

Menurut Muhamad Salim Awwa dalam bukunya *fi an Nidham al siyasah li ad daulah al Islamiyah* ada lima prinsip dasar konstitusi Islam :<sup>31</sup>

1. Keadilan
2. Kebebasan
3. Musyawarah

---

<sup>30</sup> Mutiara fahmi, "prinsip dasar hukum politik Islam dalam perspektif alquran". *Jurnal ar.raniry.ac.id/pelita* vol. 2 nomor 1(april 2017), h. 52

<sup>31</sup> ibid

4. Persamaan

5. Pertanggung jawaban pemimpin dan ketaatan Umat

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip Negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah :<sup>32</sup>

1. Prinsip kedaulatan
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip musyawarah dan Ijma'
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat
6. Prinsip amar ma'ruf nahimunkar.

*Pertama, Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau al Hukmiyah dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Yusuf, 12 :40.*

---

<sup>32</sup> Ibid

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ  
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: "Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S. Yusuf [12]:40).<sup>33</sup>

Prinsip kedaulatan juga terdapat dalam Al Quran Surat Al A'raf: 54, dan

Al An'am: 57.

Al Quran Surat Al A'raf: 54,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  
 اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ  
 وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ  
 رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan

<sup>33</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan Yusuf 40 (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 240

memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al A'raf [7]: 54).<sup>34</sup>

Al Quran Surat Al An'am: 57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا  
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْصُ الْحَقُّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ  
الْفَصِّلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Katakanlah "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (Q.S. Al An'am[6]: 57).<sup>35</sup>

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.<sup>36</sup>

Abu al-A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan asas pertama dalam teori politik Islam. Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* menegaskan, Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu

<sup>34</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *Al A'raf* 54 (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 157

<sup>35</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *Al An'am* 57 (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 134

<sup>36</sup> Asshiddiqie Jimly, "Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia," (Jakarta: Sinar Grafika cet II, th. 2011), h.101

satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

*Kedua, Prinsip Keadilan.* Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran Surat An Nissa:58 dan 135

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An Nissa [5]:58).<sup>37</sup>

Al Quran An Surat Nissa: 135

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ

<sup>37</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *An-Nissa* 58 (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h.87



بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٥﴾

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” ( Q.S, An-Nissa:[4]: 135).<sup>38</sup>

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura:15.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negarasama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, iamemulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yanghidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapatditemukan dalam Pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah

Ketiga, Prinsip musyawarah dan Ijma’. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159:

Al Quran Surat Al Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي

<sup>38</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *An-Nissa* 135 (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 100

الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya; “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.(Q.S. Al Imran [3]:159 ).<sup>39</sup>

Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38. Syura dan Ijma’adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tirani adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Jika merujuk pada ayat Alquran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha<sup>15</sup> dan Ja’far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau

<sup>39</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *ali imran* 159, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h.71

menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.<sup>40</sup>

*Keempat, Prinsip persamaan. Prinsip persamaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hujarat ayat :10*

Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”* (Q.S Al Hujarat ayat, [49]:10).<sup>41</sup>

Dan Surat Al Hujarat ayat :13

Surat Al Hujarat ayat :13

<sup>40</sup> Rusjdy Ali Muhammad, *“Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat, “(Banda Aceh: Yayasan Pena, Cetakan kedua, 2014), h. 221*

<sup>41</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *Al hujarat 10*, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h.516

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*” (Q.S Al Hujarat ayat, [49]:13).<sup>42</sup>

Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat *Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa*. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional

---

<sup>42</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *Al hujarat* 13, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h.516

pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau “Piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin - misalnya-, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal seperti ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia moderen.

Kelima, hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa: 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisaa [4]: 59).<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *An-Nissa* 59, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 86

Sebagaimana juga prinsip ini ditemukan dalam surat At Taubah:

41,

Al-Quran surat At Taubah: 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. At Taubah [9]:41).<sup>44</sup>

Al-Quran surat Al-Maidah ayat, 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
 وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

<sup>44</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, At-taubah 41, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h.194



*Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*(Q.S. Al-Maidah [5]:2)<sup>45</sup>

Al-Quran surat Al Imran ayat: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.( Q.S. Al Imran ayat[3]: 110).<sup>46</sup>

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak

<sup>45</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *Al Maidah*, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 107

<sup>46</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *Ali Imran 110*, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 64

dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat Al Isra:33, Al Baqarah: 256, Al Baqarah: 188, An Nur: 27 .

Q.S Al Isra ayat 33  
Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”(Q.S. Al Isra [17]: 33).<sup>47</sup>

Al Baqarah ayat : 256

Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

<sup>47</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *Al isra'* 33, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 285

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. Albaqara [2] : 256).<sup>48</sup>

Q.S. Al Baqarah: 188

Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al Baqara [2]: 188).<sup>49</sup>

Q.S. An Nur: 27

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ  
تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam

<sup>48</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *Al baqarah* 41, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 42

<sup>49</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *Al baqarah* 188, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 29

kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.(Q.S An-Nurr [24]:27).<sup>50</sup>

Ayat-ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al Quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. Dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

*Keenam*, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini ditemukan dalam Alquran surat Al Imran 104

Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah

---

<sup>50</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *An-Nur* 27, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 343

*dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung” . (Q.S. Al-Imran [3]: 104).*<sup>51</sup>

*Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Alquran surat Al Hajj: 41

Allah berfirman:

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *Al imran* 104, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 63

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Q.S. Al Hajj [22]:41).<sup>52</sup>

Peran amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya diemban oleh para lelaki mukmin tetapi Islam juga membebankannya kepada para wanita mukminah. Firman Allah dalam surat At Taubah: 71

Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah [9]: 71).<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *Al hajj* 41, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 337

<sup>53</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *At-Taubah* 41, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 198



Atas dasar ayat ini sebagian ulama berpandangan bahwa wanita dapat bekerja sebagai anggota parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau check and balancing bagi penguasa.

Kepemimpinan menurut Muhammad Ryas Rasyid adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh pemimpin dengan pengikut dalam mengejar tujuan bersama. Kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai penggerak/dinamisator dan kordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan semua dana sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi.<sup>54</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Islam**

#### **a. Pengertian Imam/Pemimpin**

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti : 1) orang yang memimpin, 2) petunjuk: buku petunjuk atau pedoman.<sup>55</sup> Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi " tiel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama.<sup>56</sup> Kata-

---

<sup>54</sup> Kartini kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan ; apakah pemimpin abnormal itu*. Ed. I. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 202. Cet h. 11

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta ;Balai Pustaka, 201, Cet. I, h., 874

<sup>56</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, h. 48-49

kata *imam* dibahas dalam Alquran baik dalam bentuk mufradad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di *idhofah*-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya kata-kata *imam* menunjukan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin atau suatu kaum dalam arti tidak baik seperti .<sup>57</sup>

1. Qur'an Surah At-Taubah : 12

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ  
فَقَتِّلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ



Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (Q.S. At-Taubah[9] : 12).<sup>58</sup>

2. Qur'an Surah Al-Baqarah : 124

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ  
لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي  
الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan

<sup>57</sup> Djazuli H.A, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syaria* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.54

<sup>58</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *At Taubah 12*, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h.. 188

*menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".(Q.S. Surah Al-Baqarah [2] : 124).<sup>59</sup>*

Di dalam hadis pun *imam* itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan *Imam* yang baik adalah *imam* yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta di cintai dan didoakan oleh rakyatnya, sedangkan *imam* yang buruk adalah *imam* yang membenci rakyatnya dan dibenci serta di laknat oleh rakyatnya.<sup>60</sup>

#### b. Hak-hak Imam

Al-Mawardi menyebutkan dua hak *imam*, yaitu untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Hak-hak *imam* sangat erat sekali dengan kewajiban rakyat. Hak untuk di taati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu seperti tersurat dalam Al-Qur'an.

QS. An-Nisaa Ayat :4: 59

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada*

<sup>59</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan *Al Baqarah* 124, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h.19

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 56

*Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(Q.S. An-Nisaa Ayat :4: 59) <sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hendaklah bagi seorang muslim yang beriman harus menaati Allah dan RasulNya dan pemimpin diantara kamu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya dikatakan bahwa, ternyata ada hak lain dari *imam* yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukannya sebagai *imam*. Hak yang ketiga Pada masa Abu Bakar diceritakan bahwa (enam) 6, bulan setelah di angkat menjadi khalifah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan dari hasil dagangnya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi keluraganya. maka diberi gaji 6.000 dirham setahun dan menurut riwayat lain di gaji 2.000 sampai 2.500 dirham. Hak *imam* ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya

#### c. Kewajiban-kewajiban imam

Adapun mengenai kewajiban–kewajiban Imam, para ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Mawardi kewajiban imam adalah.

1. Memelihara agama, dasar dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah di sepakati oleh umat *salaf*.

---

<sup>61</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *An-Nissa* 59, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 86

2. *Mentafidzkan* hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, Agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambanya dari kebinasaan dan kerusakan. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
5. Memerangi orang yang menentang Islam setelah di lakukan dakwa dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
6. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
7. Menetapkan kader-kader tertentu pemberian pemberian untuk orang-orang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
8. Menggunakan orang-orang yang dapat di percaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

9. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.
10. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukannya dakwa dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafhir dzimi*

Yusuf musa menambahkan kewajiban lain yaitu:

*Memperluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.*<sup>62</sup>

Apabila dikaitkan kewajiban ini dengan *maqosidu syariah*, maka tugas dan kewajiban imam tidak lepas dari hal-hal:

1. Yang *dharuri*, yang meliputi *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs* *hifdh al-'aql*, *hifdh al nasl/iridl*, dan *hifdh al mal* serta *hifdh al ummah*, dalam arti yang seluas-luasnya, seperti di dalam *hifdh al-mal* termasuk di dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, di samping menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan.
2. Hal-hal yang bersifat *haaji*, yang mengarah kepada kemudahn-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.
3. Hal-hal yang *taksini*, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran islam.<sup>63</sup>

## **B. Tata Cara Cuti Kampanye Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**

1. Pengertian Pemilihan umum (Pemilu)

---

<sup>62</sup> Djazuli H.A."fiqh siyasah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah"(Jakarta: prenada media group 2003), h.62

<sup>63</sup> Ibid h, 63



Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Penegertian pemilu (On-Line) tersedia di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umu](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umu) ( 30 juni 2020)

## 2. Pengertian cuti kampanye

Cuti atau *perlop* adalah ketidakhadiran sementara, misalnya dari tugas angkatan bersenjata dalam kasus ini cuti adalah liburan di beberapa Negara semakmuran, cuti adalah kepentingan karyawan yang di kenal dengan cuti dinas. Sedangkan kampanye adalah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan pencapaian suatu proses pengambilan suatu keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye bisa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan pembelokan pencapaian dalam sistem politik demokrasi.<sup>65</sup>

Menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 74 Tahun 2016 kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat juga merupakan hak Pegawai Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang dapat di tunda dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan cuti hanya dapat di tunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.<sup>66</sup>

Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 74 tahun 2016 Pasal 1 Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja

---

<sup>65</sup> Penegertian kampanye (On-Line) tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye> (25 juni 2020)

<sup>66</sup> Penegertian cuti (On-Line) tersedia di: <https://pakdosen.pengajar.co.id/pengertian-cuti/> (25 juni 2020)

yang diizinkan dalam waktu Cuti luar tanggungan Negara tidak masuk kerja bagi Gubernur dan wakil Gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota, dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang Pasal 70 ayat dan cuti kampanye adalah:

1. Pejabat badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah
2. Aparatur sipil Negara, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.<sup>67</sup>

### 3. Dasar hukum cuti kampanye

Cuti kampanye berdasarkan undang undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 70 berbunyi:

1. dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah

---

<sup>67</sup> Undang –undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati walikota dan Wakil walikota

2. aparatur sipil Negara, anggota kepolisian Negara Indonesia dan anggota tentara nasional dan
3. kepala desa atau sebutan lain lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan.<sup>68</sup>

Ayat 2 menyebutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota, pejabat Negara lainnya serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3 menyebutkan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalankan cuti di luar tanggungan Negara dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Ayat 4 menyebutkan, Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan wakil Gubernur diberikan oleh menteri dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

Ayat 5 menyebutkan, Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU, Kabupaten/Kota.<sup>69</sup>

#### 4. Syarat dan Prosedur cuti kampanye

syarat adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi arti lainnya dari syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya) Syarat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Syarat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga syarat dapat menyatakan nama dari seseorang,

---

<sup>68</sup> *ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>70</sup>

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, Prsedur Masuk Sekolah, Prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.<sup>71</sup>

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 syarat dan prosedur cuti adalah pada Pasal 70 ayat 3 Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama kampanye harus memenuhi ketentuan: menjalankan cuti di luar tanggungan Negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.<sup>72</sup> Pada peraturan sebelumnya tidak ada penjelasan terkait dengan syarat cuti kampanye, yang tertuang dalam perarturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan undang-undang nomor 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>70</sup> Penegertian syarat tersedia : (On-Line) di, <https://lektur.id/arti-syarat/> (23 juli 2020)

<sup>71</sup> Penegertian prosedur tersedia : (On-Line) <https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur> (23 juli 2020)

<sup>72</sup> Ibid

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5. Masa cuti kampanye bagi pejabat yang mecalonkan diri menjadi kepala daerah.

a. Pengertian masa/waktu cuti kampanye

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat juga merupakan hak Pegawai Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang dapat di tunda dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan cuti hanya dapat di tunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.<sup>73</sup> Menurut peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 74 tahun 2016 Pasal 1 Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu Cuti luar tanggungan Negara tidak masuk kerja bagi Gubernur dan wakil Gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota, dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.<sup>74</sup>

b. Jadwal waktu dan lokasi kampanye

---

<sup>73</sup> Pengertian cuti (On-Line) tersedia di: <https://pakdosen.pengajar.co.id/pengertian-cuti/> (25 juni 2020)

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil Walikota



Pasal 51 menyebutkan, kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 5 (ayat 2) dan ayat (3) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

- (1) Masa tenang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) berlangsung 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), pasangan calon dilarang melaksanakan kampanye.

Pasal 52 menyebutkan:

- (1) KPU Provinsi/Kip Aceh atau KPU/Kip Kabupaten/kota menyusun jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk setiap pasangan calon.
- (2) Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sesuai dengan tingkatan daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau Tim kampanye.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada partai politik atau gabungan partai politik, pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 satu hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada:

- a. Pemerintah daerah
- b. Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.<sup>75</sup>

#### 6. Hak dan kewajiban pejabat selama cuti kampanye

##### a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak belum lahir, didalam kamus bahasa Indonesia hak milik pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan keharusan (sesuatu hal yang dilaksanakan).<sup>76</sup>

Sedangkan Hak menurut Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Pengertian hak (On-Line) tersedia di : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak> (25 juli 2020)

<sup>77</sup> Pengertian kewajiban (On-Line) tersedia di : <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> (25 juli 2020)

Menurut Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Walikota Dan Wakil Walikota, Pelaksanaan Tugas Gubernur Atau Pelaksana Tugas Bupati Pelaksana Tugas Walikota berdasarkan surat perintah penugasan dari menteri. Pelaksanaan tugas Gubernur bupati dan pelaksanaan tugas walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir pada saat:

1. Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Selesai Menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

2. Di tunjuk pelaksanaan harian Gubernur, pelaksanaan harian bupati dan pelaksanaan harian walikota; atau

3. Dilantiknya pejabat Gubernur pejabat bupati dan walikota

Pada Pasal 8 menyebutkan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b di kecualikan a, gaji pokok b, tunjangan jabatan c, tunjangan keluarga d, tunjangan beras e, tunjangan kesehatan f, tunjangan kecelakaan kerja dan g, tunjangan kematian.

7. Larangan dan Sanksi cuti kampanye

Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam konteks sosiologi, sanksi dapat berarti kontrol sosial.<sup>78</sup>

Pengertian sanksi menurut ahli adalah suatu langka hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan dalam lingkungan masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum orang atau sekelompok yang bersalah. Saksi dalam kontek hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam kontek sosiologi sanksi adalah control sosial.<sup>79</sup> sedangkan penegertian cuti kampanye Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu cuti luar tanggungan Negara tidak masuk kerja bagi Gubernur dan wakil Gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota, dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya<sup>80</sup>

#### Larangan dan Sanksi kampanye menurut Peraturan Komisi

##### Pemilihan Umum (PKPU No 4 tahun 207) tentang kampanye pemilihan

---

<sup>78</sup> Penegertian sanksi tersedia: (On-Line) <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi> ( 7 juli 2020)

<sup>79</sup> Pengertian sanksi menurut ahli tersedia di : (On-Line): <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/> (7 juni 2020)

<sup>80</sup> Penegertian cuti (On-Line) tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/cuti> (7 juli 2020)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 68 ayat 1 menyebutkan Dalam Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada - 45 - perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik
- e. menganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
- g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
- i. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Ayat 3 menyebutkan (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pengantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat 4 menyebutkan. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Ayat 5. Menyebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota

Ayat 6. Menyebutkan Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang

menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat 7 menyebutkan, Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74, Ayat 1 menyebutkan Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 menyebutkan Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

Pasal 75 ayat 1 menyebutkan Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi

- a. peringatan tertulis
- b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.

Ayat 2 menyebutkan Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 76 ayat 1 Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.- 50 - (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.



Pasal 77 ayat 1 menyebutkan Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 3 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media masa.

Ayat 2 menyebutkan Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasal 78 Ayat 1 menyebutkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.- 51 - (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80 menyebutkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup>

## 1. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan peninjauan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang berkaitan tentang “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cuti Kampanye Pilkada”

---

<sup>81</sup> PKPU No 4 Tahun 2017 “tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

1. Penelitian dilakukan oleh Putri Ayu Prayogo yang berjudul “Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017”. Skripsi Pilkada. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penyelenggaraan pemilu presiden dan Wakil Presiden secara langsung telah mengalami dan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada secara langsung, Hal ini di dukung dengan semangat otonomi daerah yang digulirkan pada tahun 1999. Pelaksanaan pilkada secara langsung ini juga merupakan sebagai bentuk penerapan sistem predensialisme pada tingkat daerah. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005 telah di selenggarakan pilkada secara langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.<sup>82</sup> Seiring dengan masuknya pemilihan kepala daerah (pilkada) kedalam Rezim pemilu, penyelenggaraan pun diserahkan kepada KPU dalam hal ini adalah KPUD Propinsi untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan KPUD kabupaten/kota untuk pelaksanaan pemilu bupati/wakil bupati walikota/wakil walikota dalam hubungan ini KPUD dipersintasikan sebagai intansi yang tugasnya menyelenggarakan pemilu yang bebas, mandiri, bebas rahasia jujur dan adil di daerah.<sup>83</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin Ghafur yang berjudul “Problematika pengaturan cuti kampanye kepalah daerah *Incumbent* dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia” Jurnal

---

<sup>82</sup> Prayogo Ayu Putri, “Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang mengikuti Pilkada Serentak 2017” (Skripsi program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta 04 Februari 2017), h.44.

<sup>83</sup> *Ibid*, h.46

Pilkada. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2017. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat yang bersipat bebas, jujur, rahasia, mandiri dan adil. Kepala daerah yang mencalonkan diri atau *incumbent*, wajib cuti jika ingin belaga dalam kampanye pilkada. Akan tetapi yang menjadi problematika ialah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai kewajiban mundur bagi calon *incumbent* jika ingin maju dalam pilkada.<sup>84</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Desy Jayanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Cuti bagi Pejabat Daerah yang akan Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2013)” Jurnal Pilkada. Faskultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan. 2014, Sejatinnya dalam pemilihan kepala daerah pejabat yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus lah mengikuti peraturan yang telah di tetap kan oleh pemerintah setiap kepala daerah yang terlibat dalam kampanye harus memperhatikan betul posisinya sebagai kepala pemerintah dan pengurus parpol. Segalah sikap, tindakan dan kata-kata saat kampanye harus benar-benar dijaga dan dibatasi agar suasana di daerah tetap kondusif. Suatu hal yang mendasar dalam hal pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh pejabat daerah adalah ditingalkanya tugas-tugas pemerintahan yang diemban pejabat daerah tersebut. Oleh sebab yang

---

<sup>84</sup> Ghafur Jamaludin, “Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Kepala Daerah *Incumbent* dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia” (Jurnal Pilkada Fakultas Hukum Universitas Hukum Indonesia, Yoyakata, 1 Februari 2017)

demikian maka dalam hal pelaksanaan pemberian izin cuti bagi pejabat daerah dalam melakukan kampanye pemilihan umum dibutuhkan suatu mekanisme tertentu.<sup>85</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh R Famal Suwanda yang berjudul “Pelaksanaan Cuti Kampanye dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan” skripsi: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.<sup>86</sup>

Hasil penelitian tersebut adanya kelemahan dan aturan mengenai calon petahana mewajibkan cuti turut merugikan hak kepala daerah dalam bekerja menuntaskan amanah Rakyat dari hasil pemilihan langsung serta merugikan rakyat yang memilih. Kebijakan mengenai cuti kampanye bagi kepala daerah petahana akan mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan dalam melayani masyarakat serta dapat melemahkan fungsi pengawasan kepala daerah dalam mengawasi berokrasinya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Haryo Kuncoro yang berjudul “Implementasi Pemendagri No.74 tahun 2016 tentang Cuti di luar tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta” Skripsi:

---

<sup>85</sup> Jayanti Desy Dwi, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan izin Cuti bagi Pejabat Daerah yang akan Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2013)” Jurnal Pilkada, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, Medan 2014.

<sup>86</sup> R Famal Suwanda, “Pelaksanaan Cuti Kampanye dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan” (Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018).

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017.<sup>87</sup>

Hasil penelitian tersebut penerapan Permendagri Nomor 74 tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Walikota Yogyakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan Permendagri atau undang-undang Pilkada.

Adapun persamaan yang dilakukan peneliti sebelumnya sama-sama meneliti tentang Cuti Kampanye bagi pejabat dalam mencalon kembali sebagai kepala daerah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan tinjauan pustaka adalah di mana dalam permasalahannya dan tempat penelitian nya juga berbeda dalam dan tema yang di bahas mengunakot pendekatan fqih siyasah/ hukum Islam penelitian ini penulis terfokus pada prosedur cuti kampanye.

---

<sup>87</sup> Dhimas Haryo Kuncoro “Implementasi Pemendagri No.74 tahun 2016 tentang Cuti di luar tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta” (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

### Buku

Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014)

Djazuli H.A, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburasyaria* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta ; Balai Pustaka, 201

Iqbal Muhamad, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam,, kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Prenadan Media Group, 2014.

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada

Mustofa Wahid Abdul, *Hukum Islam Kontenporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial konsep-konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015 )

Syarifudin Hidayat, *Metodologi Ppenelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan &R*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, , Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang –undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2104 tentang pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati walikota dan Wakil walikota

Peraturan Mentri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil Walikota



PKPU No 4 Tahun 2017 “tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

### **Jurnal**

Ashubli Muhammad, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik*, (Desember 2002)

Ghafur Jamaludin, Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Kepala Daerah *Incumbent* dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia” *Jurnal Pilkada*, Vol. 8 No.1 Februari 2017

Jayanti Desy Dwi, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan izin Cuti Bagi Pejabat Daerah yang akan Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2013)*, *Jurnal Pilkada*, 2014.

Mutiara Fahmi, “prinsip dasar hukum politik Islam dalam perspektif alquran”. *Jurnal ar.raniry.ac.id/pelita* vol. 2 nomor 1 (april 2017)

Prayogo Ayu Putri, Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang mengikuti Pilkada Serentak 2017, *Skripsi Pilkada* 04 Februari 2017

### **Wawancara**

Rian (kasubbag teknis KPU) wawancara dengan penulis, Pelaksanaan cuti dan kampanye apakah sudah sesuai dengan mekanisme 25 Maret 2020

Antonius (anggota komisiner KPU) wawancara dengan penulis, ketentuan syarat untuk cuti kampanye, 25 maret 2020.

### **On-Line**

Definisi cuti” (On-line) tersedia di : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/cuti> (30 September 2019)

Definisi Kampanye” (On-Line) tersedia: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kampanye> (30 September 2019)

Definisi Cuti”(On-Line) tersedia di : [http://id,m.wikipedia.org/wiki/cuti](http://id.m.wikipedia.org/wiki/cuti). (30 September 2019)

Definisi pemilu (On-Line) tersedia di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umu](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umu) ( 30 juni 2020)